



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	9-10%
		1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,9%
		1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%
		1.4	Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy	60%
		1.5	Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	100%
2.	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,09%
		2.2	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,6 hari
3.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1	Indeks Literasi Keuangan	60,27
4.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
2. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
5. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
6. Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Total

(Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp1.459.147.000,-
Rp1.533.907.000,-
Rp1.497.852.000,-
Rp2.632.285.000,-
Rp1.518.209.000,-
Rp2.268.382.000,-

Rp10.909.782.000,-

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.1

Sasaran Program : SS.1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Deskripsi Sasaran Program

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari perspektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

Deskripsi IKU

Definisi
Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Formulasi
Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

$$= \frac{\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$$

Tujuan
Mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data : Google Temasek dan/atau Badan Pusat Statistik

Pejabat Penanggung Jawab Data : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Sumber Data : Google Temasek dan/atau Badan Pusat Statistik

Tingkat Kendali IKU : (....) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU : (...) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode : (....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU : (X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading : (....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	8-9%	8-9%*	9-10%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Angka merupakan proyeksi karena sampai dengan akhir tahun 2025, formulasi perhitungan masih dalam tahap koordinasi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.2

Sasaran Program : SS.1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Deskripsi Sasaran Program

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari prespektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Deskripsi IKU :

Definisi

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Formula

Kontribusi nilai ekspor barang dan jasa nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

$$= \frac{\text{Nilai Ekspor Barang} \pm \text{Nilai Ekspor Jasa}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$$

	Tujuan
	Mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (...) Moderate (x) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (x) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(x) Direct (.....) Indirect
Polarisasi IKU	: (x) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	21,7%	22,85%	21,9%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.3

Sasaran Program	:	SS.1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional			
Deskripsi Sasaran Program	:	<p>Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.</p> <p>Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri</p> <p>Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari prespektif <i>stakeholder</i> berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.</p>			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2025, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,17% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.</p> <p>Formula</p> <p>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB = (Nilai perdagangan besar dan eceran/nilai PDB) * 100%</p> <p>Tujuan</p> <p>Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</p>			
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)			
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Badan Pusat Statistik			
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga			
Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik			
Tingkat Kendali IKU	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">(.....) High</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(x) Moderate</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(....) Low</td> </tr> </table>	(.....) High	(x) Moderate	(....) Low
(.....) High	(x) Moderate	(....) Low			
Tingkat Validitas IKU	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">(...) Exact</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(x) Proxy</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(.....) Activity</td> </tr> </table>	(...) Exact	(x) Proxy	(.....) Activity
(...) Exact	(x) Proxy	(.....) Activity			
Jenis Konsolidasi Periode	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">(.....) Sum</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(.....) Average</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">(x) Take Last Known Value</td> </tr> </table>	(.....) Sum	(.....) Average	(x) Take Last Known Value
(.....) Sum	(.....) Average	(x) Take Last Known Value			

Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	13,07%	13,17%	13,07%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	13,07%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	13,07%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	13,07%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	13,07%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.4

Sasaran Program : SS.1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Deskripsi Sasaran Program

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari perspektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy*

Deskripsi IKU :

Definisi

Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* digunakan untuk mengukur pelaksanaan inisiasi pengembangan *gig economy* melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di beberapa lokasi *pilot project*. IKU ini merupakan IKU beru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu adanya pematangan konsep program *gig economy* sebelum pelatihan dilaksanakan untuk keberlanjutan program yang lebih baik. Mitra penyedia pelatihan melibatkan perusahaan teknologi (*tech company*), institusi akademik, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam pengembangan talenta ekonomi digital.

Target lokasi *Pilot Project* tahun 2026 terdiri dari 14 kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, Bandung, Medan, Banjarmasin, Lombok, Mataram, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Jayapura, dan Tangerang. Kota-kota tersebut dapat menyesuaikan, namun merupakan daerah yang representatif untuk perkembangan *gig economy* di Indonesia, didorong oleh infrastruktur digital tinggi, populasi Gen Z/milenial, serta tingginya pekerja kreatif dan *freelancer*.

Capaian IKU ini mencerminkan persentase penyelesaian inisiasi *gig economy* minimal di 9 kota *pilot project*. Program ini diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia dalam membangun tenaga kerja *gig economy* yang kompeten, adaptif terhadap transformasi digital, serta siap berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas SDM sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Inisiasi *gig economy* tidak hanya berupa launching di lokasi *pilot project*, namun juga beberapa program lainnya yang diselenggarakan seperti pelatihan dan talk show yang melibatkan berbagai narasumber dari sektor digital dan mengundang generasi muda dari berbagai perguruan tinggi.

Formula

Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* = (Realisasi daerah inisiasi *Gig Economy*/ Target daerah inisiasi *Gig Economy*) * 100%

Tujuan

Memastikan bahwa pelaksanaan inisiasi pengembangan *gig economy* melalui lokasi *pilot project* mampu menghasilkan peserta pelatihan yang tersertifikasi serta memperoleh pengakuan formal sesuai dengan kebutuhan ekosistem ekonomi digital.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Sumber Data	: Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (x) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact (x Proxy) (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	: (x) Maximize (.....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU : 1.5

Sasaran Program : SS.1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Deskripsi Sasaran Program

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari prespektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Deskripsi IKU :

Definisi

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri merupakan IKU baru merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri.

Adapun, program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran
2. Friday Mubarak
3. BINA Indonesia Great Sale
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS)
5. EPIC Sale

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, E-Commerce Association) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Capaian efektivitas menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, kesiapan pelaku usaha, serta respons positif masyarakat terhadap kampanye belanja nasional. Dengan demikian, indikator ini berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan guna memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Formula

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri = (Realisasi nilai transaksi program belanja nasional/ Target nilai transaksi program belanja nasional yang direncanakan) * 100%

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan kegiatan Program Belanja Nasional.

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
Sumber Data	: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (x) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (x) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	: (x) Maximize (.....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU: S.2.1

Sasaran Program	: SS.2 Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas						
Deskripsi Sasaran Program	Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional. Penguatan logistik nasional dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kolaborasi lintas sektor, serta keandalan, yang bertujuan untuk mendukung penurunan persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto dan peningkatan kinerja logistik nasional dalam indikator kinerja logistik global.						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB						
Deskripsi IKU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td style="text-align: left;">Definisi</td> </tr> <tr> <td> <p>Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB adalah biaya/pengeluaran dalam rangka penanganan kegiatan logistik mulai dari titik awal sampai titik akhir yang dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (PDB).</p> <p>Biaya transportasi logistik merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi ekonomi suatu negara. Saat ini biaya transportasi logistik merupakan kontributor utama dalam pembentukan biaya logistik nasional (62%) dan rasionya terhadap PDB sebesar 8,79%. Semakin kecil proporsinya terhadap PDB, semakin efisien sistem logistik yang dimiliki, dan semakin tinggi daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan integrasi transportasi darat dan laut menjadi faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Biaya transportasi logistik mencakup biaya transportasi inhouse dan outsource menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi inhouse meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan transportasi milik sendiri. Biaya transportasi outsource meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan jasa transportasi pihak lain.</p> <p>Biaya transportasi logistik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel ▪ Biaya Jasa Penunjang Angkutan ▪ Biaya Jasa Angkutan Laut ▪ Biaya Jasa Angkutan Udara ▪ Biaya Jasa Pos dan Kurir ▪ Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ▪ Jasa Angkutan Rel </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td style="text-align: left;">Formula</td> </tr> <tr> <td> <p>Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB = (Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB) * 100%</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td style="text-align: left;">Tujuan</td> </tr> <tr> <td> <p>Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.</p> </td> </tr> </table>	Definisi	<p>Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB adalah biaya/pengeluaran dalam rangka penanganan kegiatan logistik mulai dari titik awal sampai titik akhir yang dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (PDB).</p> <p>Biaya transportasi logistik merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi ekonomi suatu negara. Saat ini biaya transportasi logistik merupakan kontributor utama dalam pembentukan biaya logistik nasional (62%) dan rasionya terhadap PDB sebesar 8,79%. Semakin kecil proporsinya terhadap PDB, semakin efisien sistem logistik yang dimiliki, dan semakin tinggi daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan integrasi transportasi darat dan laut menjadi faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Biaya transportasi logistik mencakup biaya transportasi inhouse dan outsource menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi inhouse meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan transportasi milik sendiri. Biaya transportasi outsource meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan jasa transportasi pihak lain.</p> <p>Biaya transportasi logistik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel ▪ Biaya Jasa Penunjang Angkutan ▪ Biaya Jasa Angkutan Laut ▪ Biaya Jasa Angkutan Udara ▪ Biaya Jasa Pos dan Kurir ▪ Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ▪ Jasa Angkutan Rel 	Formula	<p>Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB = (Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB) * 100%</p>	Tujuan	<p>Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.</p>
Definisi							
<p>Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB adalah biaya/pengeluaran dalam rangka penanganan kegiatan logistik mulai dari titik awal sampai titik akhir yang dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (PDB).</p> <p>Biaya transportasi logistik merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi ekonomi suatu negara. Saat ini biaya transportasi logistik merupakan kontributor utama dalam pembentukan biaya logistik nasional (62%) dan rasionya terhadap PDB sebesar 8,79%. Semakin kecil proporsinya terhadap PDB, semakin efisien sistem logistik yang dimiliki, dan semakin tinggi daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan integrasi transportasi darat dan laut menjadi faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Biaya transportasi logistik mencakup biaya transportasi inhouse dan outsource menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi inhouse meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan transportasi milik sendiri. Biaya transportasi outsource meliputi biaya perpindahan dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain dan pengangkutan impor/ekspor menggunakan jasa transportasi pihak lain.</p> <p>Biaya transportasi logistik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel ▪ Biaya Jasa Penunjang Angkutan ▪ Biaya Jasa Angkutan Laut ▪ Biaya Jasa Angkutan Udara ▪ Biaya Jasa Pos dan Kurir ▪ Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ▪ Jasa Angkutan Rel 							
Formula							
<p>Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB = (Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB) * 100%</p>							
Tujuan							
<p>Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.</p>							
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)						
Unit/Pihak Penyedia Data	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik						
Pejabat Penanggung Jawab Data	: Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional						

Sumber Data	:	Laporan PDB Lapangan Usaha Triwulanan dan Tahunan dan/atau Laporan Tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Tingkat Kendali IKU		(...) High (x) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (x) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(x) Cascading Peta (...) Cascading NonPeta (...) NonCascading
Metode Cascading		(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	:	(...) Maximize (x) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	8,79%*	8,27%	8,79	8,09%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Realisasi di tahun 2024 sebagai *baseline* (sumber: RPJMN 2025-2029)

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	1,8 (hari)*	1,7 (hari)	1,22 (hari)	1,6 (hari)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	1,7 (hari)	1,12 (hari)	1,6 (hari)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	1,7 (hari)	1,29 (hari)	1,6 (hari)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	1,7 (hari)	1,13 (hari)	1,6 (hari)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	1,7 (hari)	1,32 (hari)	1,6 (hari)

*Realisasi di tahun 2024 sebagai *baseline* (sumber: RPJMN 2025-2029)

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	57,25	66,64	60,27*
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU : 4.1

Sasaran Program	: SS.4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital ; d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital ; e. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi perniagaan dan ekonomi digital ; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan (2) Pengembangan Ekspor Nasional (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional (4) Pengembangan Ekonomi Digital (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan <p>Formula</p> <p>Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:</p> $\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$ <p>Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.</p> <p>Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut: Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100 Efektif (3), rentang nilai 81 - 90 Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80 Kurang efektif (1), rentang nilai < 70</p> <p>Tujuan</p>

Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan guna pencapaian target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pertiagaan dan Ekonomi Digital.

Satuan Pengukuran		Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data		Seluruh Eselon II Kedepatian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data		Seluruh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Seluruh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (x) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	1	1 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	1	1 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	1	1 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU : 5.1

Sasaran Program	:	SS.5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas						
Deskripsi Sasaran Program	:	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam memberikan fasilitas dan sarana pelayanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan ekonomi digital; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perniagaan dan ekonomi digital; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital						
Deskripsi IKU	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Definisi</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Formula</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><i>(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3+Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)/5</i></p> </div> <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tujuan</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>Mengukur tingkat kepuasan dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p> </td> </tr> </table>	Definisi	<p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p>	Formula	<p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><i>(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3+Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)/5</i></p> </div> <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>	Tujuan	<p>Mengukur tingkat kepuasan dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
Definisi								
<p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p>								
Formula								
<p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><i>(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3+Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)/5</i></p> </div> <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>								
Tujuan								
<p>Mengukur tingkat kepuasan dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>								
Satuan Pengukuran	:	Indeks						
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital						
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital						
Sumber Data	:	Hasil Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital						

Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(....) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3,43	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4*	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,41	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4*	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,43	3 dari 4

*Angka merupakan proyeksi karena pada tahun 2025 survei dilakukan semesteran

Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	100%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	27,27%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	45,45%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	63,64%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	100%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	9-10%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital	a. Koordinasi pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait e-commerce b. Koordinasi pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce	a. Monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce b. Monitoring dan evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce sebagai proyeksi pengukuran ekonomi digital terhadap PDB	a. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce b. Perencanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2027
		1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,9%	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan ekspor barang dan jasa	a. Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor tahun 2025 b. Koordinasi kebijakan high level meeting peningkatan ekspor	a. Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 b. Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023	Koordinasi Identifikasi Isu Strategis dalam Kerangka Fasilitas Perdagangan Lintas K/L dalam Lingkup Komisi Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP)	a. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA b. Perencanaan kegiatan peningkatan ekspor tahun 2026
		1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07 %	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan perdagangan besar dan eceran	Koordinasi tindak lanjut identifikasi isu/permasalahan dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2025	Koordinasi kebijakan penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Koordinasi evaluasi penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	a. Monitoring penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2026 b. Perencanaan kegiatan optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan perdagangan besar dan eceran tahun 2027
		1.4 Persentase Penyelesaian Inisiasi <i>Gig Economy</i>	60%	Optimalisasi pelaksanaan inisiasi <i>gig economy</i>	a. Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan <i>Gig Economy</i> di lokasi pilot project b. Pelaksanaan Launching dan Pelatihan Program Gen Z: <i>Gig Economy & AI Competition</i> di lokasi pilot project	Pelaksanaan Program Pelatihan <i>Gig Economy</i> di lokasi pilot project	Monitoring Program Pelatihan <i>Gig Economy</i> di lokasi pilot project	Tindak lanjut Monitoring Program Pelatihan <i>Gig Economy</i> di lokasi pilot project
		1.5 Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	100%	Optimalisasi pelaksanaan sasaran program belanja dalam negeri	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan I	a. Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan II	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan III	a. Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester II

						b. Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester I		b. Perencanaan Program Belanja Dalam Negeri tahun 2027
2	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.2 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,09%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran biaya transportasi logistik	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	Koordinasi dan monitoring digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	a. Tindak lanjut koordinasi dan monitoring terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> b. Perencanaan kegiatan pengembangan logistik tahun 2027
		2.1 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,6 Hari	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor dan impor di pelabuhan	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan	Koordinasi, sosialisasi, dan monitoring kepada seluruh pemangku kepentingan terkait strategi peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan	Tindak lanjut koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan strategi peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan
3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1 Indeks Literasi Keuangan	60,27	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan literasi keuangan	a. Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas b. Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA untuk Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan	a. Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada Semester 1 b. Evaluasi pilot project PINTAR di Kabupaten Kuningan	a. Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada Semester 2 b. Sosialisasi dan Replikasi program PINTAR di daerah lain c. Pelaksanaan bulan literasi keuangan	a. Perencanaan kegiatan peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada tahun 2027 b. Rakornas TPAKD c. Pelaksanaan bulan inklusi keuangan
4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang efektif	a. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor b. Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi c. Koordinasi identifikasi permasalahan terkait	a. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan b. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan c. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	a. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi dan Integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> b. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait Perdagangan Ritel c. Koordinasi dan Monitoring Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks	a. Monitoring Evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan b. Tindak Lanjut Monitoring Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi c. Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait

					peningkatan literasi keuangan	d. Koordinasi penyusunan alternatif kebijakan peningkatan literasi keuangan	infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi d. Rapat koordinasi penyusunan kebijakan terkait peningkatan literasi keuangan	peningkatan literasi keuangan
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	a. Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2026 b. Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II
6	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	92%	1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) 2. Nilai SAKIP 3. Tingkat Digitalisasi Arsip	a. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV) b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 d. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Jakarta, Januari 2026
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital, 



Ali Murtopo